

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian Indonesia sebaiknya didukung oleh sektor pemerintah maupun sektor swasta. Berbagai kegiatan yang dilakukan sektor pemerintah mempunyai peranan yang cukup penting dalam perkembangan perekonomian tersebut. Termasuk salah satunya pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, pembangunan gedung, pembangunan jembatan, dan pembangunan jaringan irigasi yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, pembangunan infrastruktur tersebut juga melibatkan sektor swasta dalam pembangunannya. Ini dikarenakan APBN pemerintah tidak mampu mendukung penuh pembiayaan infrastruktur.

Politik pengembangan ekonomi dalam Islam itu berarti bahwa perhatian terhadap bidang ekonomi merupakan bagian dari politik syariah dan apa yang menjadi tuntutan nya tentang pemeliharaan sumber-sumber ekonomi dan pengembangannya, meningkatkan kemampuan produksi dengan mengembangkan seni dan metodenya, dan hal-hal lain yang menjadi keharusan dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi umat, memenuhi kebutuhan yang mendasar, dan memerangi kemiskinan.

Seiring dengan perkembangan jaman, pemerintah membuat suatu program perencanaan yang merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat dan memperluas pembangunan keseluruhan wilayah Indonesia. Percepatan dan

perluasan pembangunan infrastruktur dalam program perencanaan tersebut menjadi wujud nyata keinginan untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan yang berkualitas. Percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur perlu terus dilakukan hingga tercapainya hal-hal yang selama ini telah dicita-citakan.

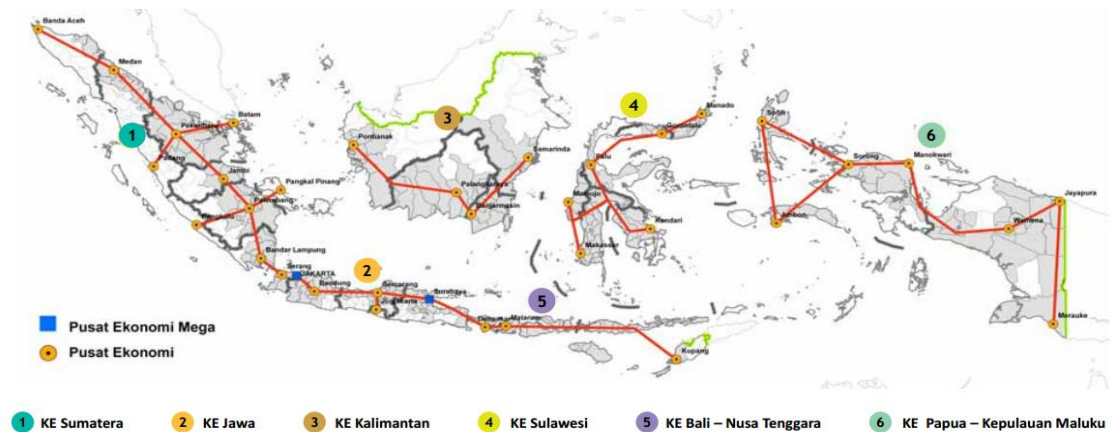
Program pemerintah yang dimaksud yaitu *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Program ini merupakan program yang dibentuk pada tahun 2011, yang mempunyai visi yang akan dicapai di tahun 2025 yaitu Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Untuk mencapai visi tersebut dapat melakukan strategi-strategi utama seperti pengembangan potensi ekonomi melalui koridor ekonomi, penguatan konektivitas nasional dan penguatan kemampuan sdm dan iptek nasional.

Program *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) memiliki 6 koridor ekonomi, yaitu Koridor Ekonomi Sumatera, Koridor Ekonomi Jawa, Koridor Ekonomi Kalimantan, Koridor Ekonomi Sulawesi, Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara, dan Koridor Ekonomi Papua - Kepulauan Maluku. Masing-masing koridor memiliki tema pembangunan yang berbeda, seperti Koridor Ekonomi Sumatera memiliki tema pembangunan sebagai Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional, Koridor Ekonomi Jawa memiliki tema pembangunan sebagai Pendorong Industri dan Jasa Nasional, Koridor Ekonomi Kalimantan memiliki tema pembangunan sebagai Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan Lumbung Energi Nasional, Koridor Ekonomi Sulawesi memiliki tema

pembangunan sebagai Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas dan Pertambangan Nasional, Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara memiliki tema pembangunan sebagai Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional, Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku memiliki tema pembangunan sebagai Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional.

Gambar 1.1

Koridor Ekonomi MP3EI



Sumber : MP3EI (2011)

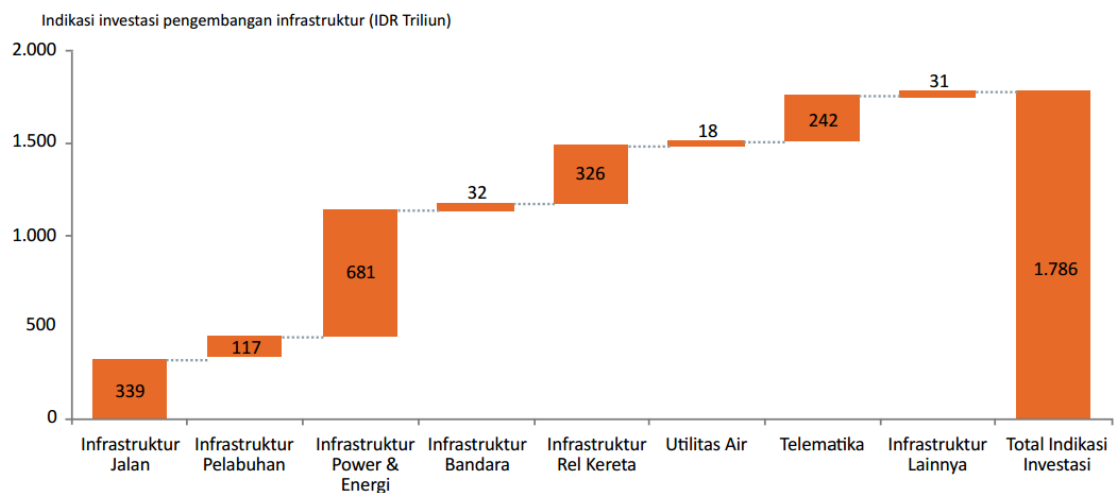
Kunci keberhasilan MP3EI ini terletak pada implementasi dari perencanaan-perencanaannya namun berkesinambungan. Implementasi tersebut terdiri dari tiga fase hingga tahun 2025. Fase pertama yaitu Implementasi *quick wins*, dengan cara penyusunan rencana aksi untuk *debottlenecking* regulasi, perizinan, insentif dan pembangunan dukungan infrastruktur yang diperlukan, serta realisasi komitmen investasi. Fase kedua yaitu memperkuat basis ekonomi dan investasi, dengan cara mempercepat pembangunan proyek infrastruktur jangka panjang. Fase ketiga yaitu melaksanakan pertumbuhan berkelanjutan,

dengan cara pemantapan daya saing industri untuk memenangkan persaingan global.

Melalui MP3EI ini juga telah teridentifikasi indikasi investasi untuk pengembangan infrastruktur yang mendukung penguatan konektivitas nasional, berikut merupakan *breakdown* dari indikasi investasi tersebut:

Gambar 1.2

***Breakdown* Indikasi Investasi untuk Infrastruktur dalam Mendukung MP3EI**

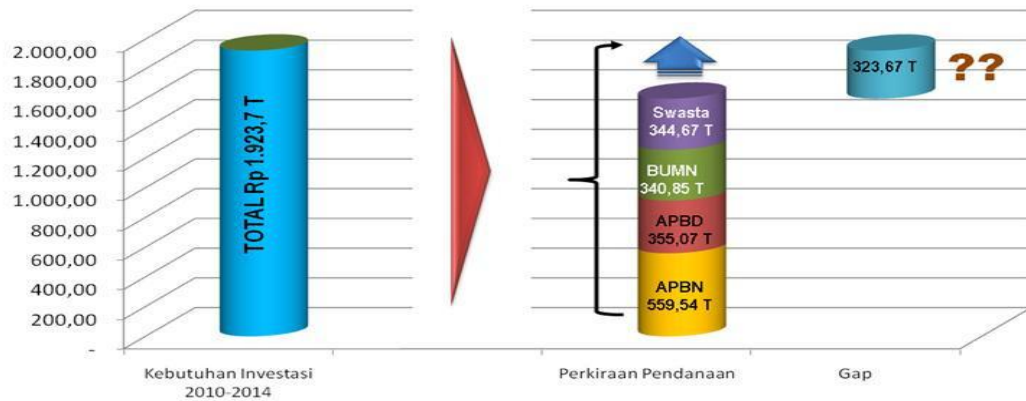


Sumber : MP3EI (2011)

Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah telah mencanangkan, bahwa kebutuhan dana pembangunan infrastruktur publik antara Tahun 2010-2014 adalah sebesar Rp1.924 Triliun. Kebutuhan tersebut diperhitungkan berdasarkan asumsi, bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 5,5 – 5,6% pada Tahun 2010 menjadi 7,0 – 7,7% pada Tahun 2014 diperlukan dana pembangunan infrastruktur minimal sebesar 5% dari PDB per tahun.

Gambar 1.3

Kebutuhan Investasi Infrastruktur dalam RPJM 2010- 2014



Sumber : investasikonstruksi.net (2011)

Pembangunan infrastruktur pada bidang konstruksi ini akan mempengaruhi nilai PDB dan laju pertumbuhan suatu negara. Nilai PDB selain berasal dari bidang konstruksi, juga berasal dari lapangan usaha bidang lainnya.

Tabel 1.1

Nilai PDB Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2011-2013

Nilai PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011–2013,
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan Tahun 2013

Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku (triliun Rupiah)			Atas Dasar Harga Konstan 2000 (triliun Rupiah)			Laju Pertumbuhan 2013 (persen)	Sumber Pertumbuhan 2013 (persen)
	2011	2012	2013	2011	2012	2013		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	1 091,4	1 193,5	1 311,0	315,0	328,3	339,9	3,54	0,45
2. Pertambangan dan Penggalian	877,0	970,8	1 020,8	190,1	193,1	195,7	1,34	0,10
3. Industri Pengolahan	1 806,1	1 972,5	2 152,6	633,8	670,2	707,5	5,56	1,42
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	55,9	62,2	70,1	18,9	20,1	21,2	5,58	0,04
5. Konstruksi	753,6	844,1	907,3	159,1	170,9	182,1	6,57	0,43
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	1 023,7	1 148,7	1 301,5	437,5	473,1	501,2	5,93	1,07
7. Pengangkutan dan Komunikasi	491,3	549,1	636,9	241,3	265,4	292,4	10,19	1,03
8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan	535,2	598,5	683,0	236,2	253,0	272,1	7,56	0,73
9. Jasa-jasa	785,0	890,0	1 000,8	232,7	244,8	258,2	5,46	0,51
Produk Domestik Bruto (PDB)	7 419,2	8 229,4	9 084,0	2 464,6	2 618,9	2 770,3	5,78	5,78
PDB Tanpa Migas	6 795,9	7 588,3	8 416,0	2 322,7	2 481,8	2 637,0	6,25	-

Sumber : www.bps.go.id (2014)

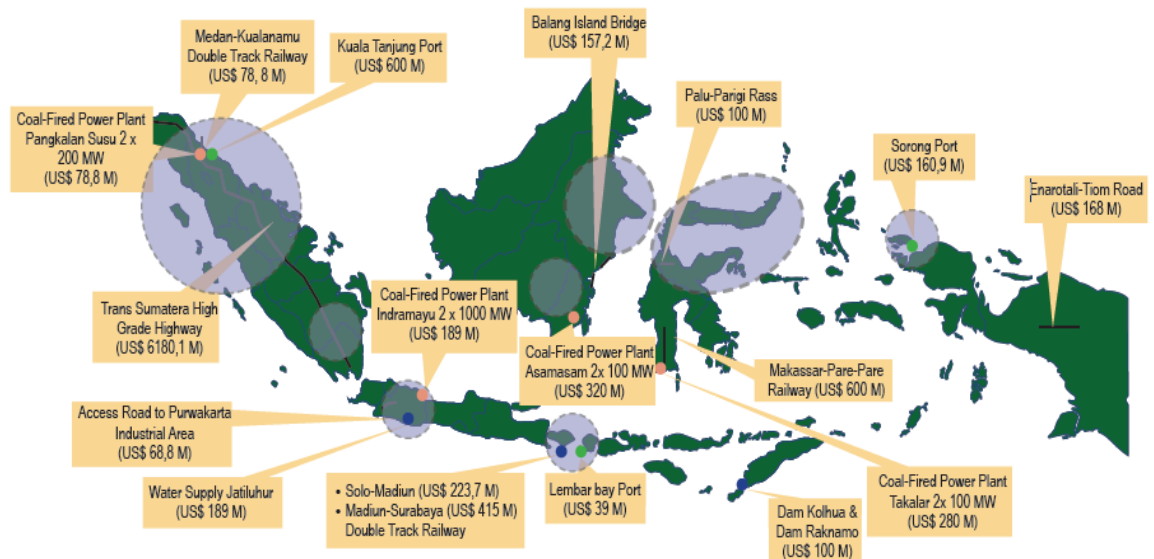
Berdasarkan pada tabel diatas, diketahui bahwa nilai PDB mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, laju pertumbuhan tahun 2013 pada bidang konstruksi menunjukkan angka 6,57 dan menduduki peringkat ke 3 setelah bidang usaha keuangan, real estate dan jasa perusahaan.

Pertumbuhan PDB merupakan suatu indikator utama keadaan makroekonomi. Pemerintah di negara manapun dapat naik atau turun berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapainya dan bahkan baik buruknya kualitas kebijakan pemerintah dan tinggi atau rendahnya mutu aparatnya dibidang ekonomi.

Gambar 1.4

Dua Puluh Empat Proyek Infrastruktur Utama/Strategis Mulai 2014

Pemerintah akan memprioritaskan pembiayaan untuk 24 proyek infrastruktur utama/strategis mulai 2014



Notes : Exchange rate IDR/US\$=10.000;Palapa Ring (US\$ 280 M) is a priority project but no displayed (multi-corridor scale project)
*) development of existing port

Following the 3 pillars of MP3EI, the entire process of selecting priority infrastructure projects is based on :

- Urgency of the project; ease of implementation (readiness level); social, economic, and environmental effects;
- Supporting Production Centers or Investment-Focused Areas with strategic value, coupled with a high level of investment readiness, for example : Sei Mangkei, Maloy, Bitung, karawang.
- Project's contribution to strengthening National Connectivity

Sumber : Buku Konstruksi Indonesia (2013)

Pembangunan infrastruktur selalu melibatkan peran Industri jasa konstruksi. Dimana industri jasa konstruksi merupakan industri yang mencakup semua pihak yang terkait dengan proses konstruksi termasuk tenaga profesi, pelaksana konstruksi dan juga para pemasok yang bersama-sama memenuhi kebutuhan pelaku dalam industri. Jasa konstruksi adalah jasa yang menghasilkan prasarana dan sarana fisik. Jasa tersebut meliputi kegiatan studi, penyusunan rencana teknis/rancang bangun, pelaksanaan dan pengawasan serta pemeliharannya. Mengingat bahwa prasarana dan sarana fisik merupakan landasan pertumbuhan sektor-sektor dalam pembangunan nasional serta kenyataan bahwa jasa konstruksi berperan pula sebagai penyedia lapangan kerja, maka jasa konstruksi penting dalam pembangunan nasional.

Dalam industri jasa konstruksi ini membutuhkan kerjasama di berbagai bidang yang membuka dan memberikan kesempatan bagi para investor asing untuk mengembangkan usahanya di Indonesia memerlukan adanya peningkatan kemampuan perusahaan-perusahaan khususnya perusahaan jasa konstruksi agar dapat menghadapi persaingan yang semakin ketat.

Sektor konstruksi seringkali mengambil peran strategis sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Ciri sektor ini yang menyerap banyak tenaga kerja, membutuhkan modal yang besar, dan menciptakan *multiplier effect* yang besar terhadap sektor lain, membuat sektor ini seringkali sukses mendongkrak pembangunan ekonomi banyak negara.

Dalam rangka menghadapi era globalisasi dan tuntutan para pengguna Jasa Konstruksi Nasional terhadap kinerja yang lebih baik, maka perusahaan jasa

konstruksi harus senantiasa memiliki kemampuan dan kompetensi yang cukup dalam menghadapi tuntutan masyarakat akan mutu konstruksi. Dalam hal menjaga kompetensi dan kualitas perusahaan, erat kaitannya dengan pengelolaan sumber daya, yakni pengelolaan *Finansial*/keuangan, sumber daya manusia, dan penyediaan sarana dan prasarana.

Faktor kunci dalam pengembangan jasa konstruksi nasional adalah peningkatan kemampuan usaha, terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, serta peningkatan peran masyarakat secara aktif dan mandiri dalam melaksanakan kedua upaya tersebut. Peningkatan kemampuan usaha ditopang oleh peningkatan profesionalisme dan peningkatan efisiensi usaha. Sedangkan terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dapat dicapai antara lain melalui pemenuhan hak dan kewajiban dan adanya kesetaraan kedudukan para pihak terkait.

Dengan menggunakan peta proses bisnis, hendaknya badan usaha dapat menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu dan prosedur-prosedur yang terkait, serta memperbaiki keefektifan sistem manajemen mutu. Peran industri konstruksi dalam ekonomi juga dapat dilihat dari segi potensi lapangan kerja, kebutuhan material dan dampaknya, peraturan publik yang mendukung ekonomi, dan termasuk dampak perluasan industri konstruksi terhadap ekonomi.

Industri konstruksi dapat dikategorikan sebagai salah satu industri yang berperan penting pada proses pembangunan ekonomi suatu negara. Kontribusi industri konstruksi terhadap total *Gross Domestic Product* (GDP) suatu negara

maju lebih kurang 7%-10%. Adapun di negara yang sedang berkembang, industri konstruksi menghasilkan 3%-6% dari total GDP. Industri konstruksi juga memberikan kontribusi kepada pembukaan lapangan kerja serta distribusi pendapatan bagi masyarakat lapisan bawah.

Pada dasarnya, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan memerlukan dukungan dari perusahaan-perusahaan konstruksi yang dapat diandalkan dan efisien. Karena pada dasarnya tujuan dari perusahaan yaitu untuk memperoleh profit atau keuntungan yang maksimal dan berkelanjutan. Kinerja keuangan dari perusahaan konstruksi dapat dinilai dari bagaimana perusahaan konstruksi tersebut dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki seefisien mungkin, memperoleh laba yang sesuai diharapkan oleh pihak perusahaan, dan bagaimana perusahaan tersebut dapat memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dari perusahaan tersebut.

Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor infrastructure*). Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak eksternalitas positif dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efisiensi perekonomian.

Ketika menilai keefektifan dari suatu perusahaan dalam menghasilkan laba atau profit, maka dapat diukur dari rasio profitabilitasnya perusahaan tersebut. Dimana rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.

Dalam perspektif Islam, keuntungan itu memiliki syariat, yang dikemukakan oleh A.Kadir (2013 :116) sebagai berikut:

Asal dari mencari keuntungan itu disyariatkan, kecuali apabila dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum syara'. Prinsipnya, setiap keuntungan berasal dari berbagai usaha bisnis yang legal dihalalkan. Bisnis apapun yang bersumber dari usaha yang ilegal, jelas diharamkan.

Return on equity merupakan rasio antara laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan produktivitas dari dana-dana pemilik perusahaan didalam perusahaannya sendiri. Rasio ini juga menunjukkan rentabilitas dan efisiensi modal sendiri (Munawir, 2010).

Untuk mempertahankan kelanjutan dan pengembangan dari suatu bisnis, maka perusahaan harus memiliki sistem manajemen yang baik. Sistem manajemen tersebut diantaranya dari sisi keuangan perusahaan tersebut. Dalam hal ini, modal kerja yang dimiliki perusahaan mempunyai peranan penting (Sutanto dan Pribadi, 2012).

Modal kerja perusahaan harus mendapatkan perhatian yang cukup, dikarenakan dalam operasional perusahaan, modal kerja secara langsung dapat mempengaruhi kegiatan sehari-hari perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan yang tidak dapat memperhitungkan tingkat modal kerja dengan baik, maka perusahaan kemungkinan mengalami *insolvency* (tak mampu memenuhi kewajiban jatuh tempo), membuang kesempatan memperoleh laba dan bahkan mungkin terpaksa harus dilikuidasi.

Pembentukan modal dalam ragam bentuknya merupakan pilar terpenting yang menopang kesuksesan pengembangan ekonomi. Dimana berupaya dapat mengenali hal terpenting yang terdapat di dalam fikih ekonomi Umar tentang pembentukan modal hakiki, dan pembentukan modal sosial (bangunan dasar)

dengan menilai keduanya sebagian bentuk modal yang lazim bagi proses pengembangan ekonomi.

Indikator untuk mengukur efisiensi modal kerja, dapat digunakan sebuah alat yaitu perputaran modal kerja. Angka perputaran ini membandingkan angka penjualan bersih dengan modal kerja (selisih antara harta lancar dengan hutang lancar), semakin besar angka perputaran ini, makin insentif dan efisien penggunaan modal kerja.

Periode perputaran modal kerja dimulai dari saat dimana kas diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja sampai saat dimana kembali menjadi kas. Makin pendek periode tersebut, makin cepat perputarannya atau makin tinggi tingkat perputarannya (*turnover rate-nya*) (Riyanto, 2010).

Untuk menggambarkan hubungan antara perputaran modal kerja bersih dan profitabilitas adalah dilihat dari bagaimana suatu perusahaan mampu menghandel perputaran modal kerjanya, makin singkat periode perputaran modal kerja maka profitabilitas yang akan diterima semakin tinggi, dan sebaliknya makin lama periode perputaran modal kerja maka profitabilitas yang akan diterima semakin rendah (Yusraini, Hasan, dan Helen, 2009).

Selain dengan mengukur perputaran modal kerja, untuk mengetahui hal-hal yang berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan, antara lain dengan mengukur tingkat efisiensi dari perusahaan tersebut, yaitu dengan menghitung perputaran total asset (*Total Asset Turnover*).

Total Asset Turnover merupakan rasio antara penjualan dengan total aktiva yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva secara keseluruhan. Apabila rasio

rendah itu merupakan indikasi bahwa perusahaan tidak beroperasi pada volume yang memadai bagi kapasitas investasinya.

Total Asset Turnover menunjukkan efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva untuk menciptakan penjualan bersih. Semakin efektif perusahaan dalam menggunakan aktiva, maka semakin baik kinerja perusahaan. Dengan kinerja perusahaan yang semakin baik, maka profitabilitas perusahaan semakin meningkat (Sari dan Chabachib, 2013).

Dalam perspektif Islam, efisiensi yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi dalam Euis Amalia (2010: 257), sebagai berikut:

Efisiensi mungkin bukan perhatian utama. Sifat yang membuat disenangi (*desirability*) mempunyai kedudukan yang sama penting dengan efisiensi. *Desirability* senantiasa ditentukan oleh masalah. Efisiensi dan *desirability* secara serempak dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan *hajiyat* dan *tahsiniyat*. Oleh karena itu, efisiensi dan *desirability* secara bersama-sama mendapatkan perhatian utama dalam ilmu ekonomi Islam.

Hal yang dapat mempengaruhi profitabilitas dari perusahaan, selain dari tingkat perputaran modal kerja, dan tingkat efisiensi, maka dapat diukur dari tingkat solvabilitas perusahaan.

Solvabilitas merupakan gambaran kemampuan perusahaan dalam memenuhi dan menjaga kemampuannya untuk selalu mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar utang secara tepat waktu (Fahmi, 2011). Dalam menentukan tingkat solvabilitas perusahaan dapat berdasarkan pada rasio solvabilitas. Dimana salah satu rasio yang sering digunakan yaitu rasio hutang terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio*). Rasio utang atas modal ini merupakan rasio yang menggambarkan sampai sejauh mana modal dapat menutup utang-utang kepada pihak luar. Supaya aman porsi utang terhadap modal sendiri harus

lebih kecil, jadi semakin kecil perbandingannya semakin lebih aman (*Solvabel*). Semakin tinggi persentase DER menunjukkan bahwa jumlah hutang yang dimiliki oleh perusahaan lebih besar daripada modal, sehingga biaya yang ditanggung oleh perusahaan untuk pemenuhan kewajiban akan semakin besar, disisi lain resiko kebangkrutan dan kemungkinan gagal bayar meningkat (Van Horne dan Wachowicz, 2005). Apabila hal tersebut terjadi, maka akan berdampak pada menurunnya perolehan profitabilitas perusahaan (Hastuti, 2010).

Sebelum membuat berbagai keputusan dibidang keuangan, seorang manajer keuangan haruslah mampu menganalisis kondisi keuangan dan prestasi keuangan dari perusahaan. Hal yang dapat dilakukan seorang manajer keuangan yaitu melakukan analisa keuangan atau melakukan analisis rasio. Analisa rasio dapat dilakukan terhadap laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan yaitu neraca dan laporan laba rugi.

Perusahaan konstruksi yang ada di Indonesia, terdiri dari perusahaan konstruksi BUMN dan perusahaan konstruksi swasta. Beberapa perusahaan konstruksi BUMN diantaranya PT Adhi Karya, Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk dan PT Wijaya Karya, Tbk, merupakan perusahaan konstruksi BUMN yang mendominasi pembangunan ekonomi di Indonesia. Karena perusahaan tersebut sudah *Go Public*, maka datanya lebih mudah diperoleh dan diakses.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dilihat peranan perputaran modal kerja, efisiensi dan solvabilitas dapat mempengaruhi profitabilitas pada perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk

mengangkat masalah ini sebagai bahan penulisan ilmiah dengan judul “**Analisis Perputaran Modal Kerja, Efisiensi dan Solvabilitas Terhadap Profitabilitas Perusahaan Konstruksi di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013 dan Tinjauannya dari Sudut Pandang Islam**”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat perputaran modal kerja mempengaruhi profitabilitas perusahaan di PT Adhi Karya, Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk dan PT Wijaya Karya, Tbk?
2. Bagaimana tingkat efisiensi mempengaruhi profitabilitas perusahaan di PT Adhi Karya, Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk dan PT Wijaya Karya, Tbk?
3. Bagaimana tingkat solvabilitas mempengaruhi profitabilitas perusahaan di PT Adhi Karya, Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk dan PT Wijaya Karya, Tbk?
4. Bagaimana tingkat perputaran modal kerja, efisiensi dan solvabilitas mempengaruhi profitabilitas perusahaan di PT Adhi Karya, Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk dan PT Wijaya Karya, Tbk?
5. Bagaimana pandangan Islam terhadap perputaran modal kerja, efisiensi, solvabilitas, dan profitabilitas pada perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penulis bermaksud untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, sehingga dapat dicapai tujuan dari penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat perputaran modal kerja terhadap profitabilitas perusahaan di PT Adhi Karya, Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk dan PT Wijaya Karya, Tbk.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat efisiensi terhadap profitabilitas perusahaan di PT Adhi Karya, Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk dan PT Wijaya Karya, Tbk.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat solvabilitas terhadap profitabilitas perusahaan di PT Adhi Karya, Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk dan PT Wijaya Karya, Tbk.
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat perputaran modal kerja, efisiensi dan solvabilitas terhadap profitabilitas perusahaan di PT Adhi Karya, Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk dan PT Wijaya Karya, Tbk.
5. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap perputaran modal kerja, efisiensi, solvabilitas, dan profitabilitas pada perusahaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan dan tujuan yang telah diuraikan, maka manfaat dari penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam menambah pengetahuan dan memperluas wawasan dalam bidang keuangan mengenai perputaran modal kerja, efisiensi, solvabilitas dan profitabilitas pada perusahaan.

2. Bagi perusahaan

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perputaran modal kerja, efisiensi, solvabilitas serta memberikan pemikiran untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan profitabilitas.

3. Bagi pihak lain

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi maupun bahan bagi penelitian selanjutnya mengenai perputaran modal kerja, efisiensi, solvabilitas dan profitabilitas pada perusahaan.